

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, TENAGA KERJA  
DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2006-2010**



**NASKAH PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Di susun oleh :**

**TEGUH ANSHORI**

**B 300 090 028**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :  
**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, TENAGA KERJA  
DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2006-2010**

Yang ditulis oleh :

**TEGUH ANSHORI**  
B 300 090 028

Perandatangani berpendapat bahwa bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 21 Juli 2013


Pembimbing

  
**Eni Setyowati, SE., M.Si**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
**Dr. Irvono, S.E., Ak., M.Si**  
NIK : 642

# ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN, TENAGA KERJA DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2006-2010

TEGUH ANSHORI

B 300 090 028

## ABSTRAKSI

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang *familier* digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21). Dengan terjadinya Pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya, diantaranya tingkat kemiskinan, tenaga kerja dan Kemandirian Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal, berupa rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah.

Studi ini akan meneliti tentang pengaruh kemiskinan, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemiskinan, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010 sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pemerintah eks-Karesidenan Surakarta dalam mengambil kebijakan terkait pertumbuhan ekonominya. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan metode analisis yang digunakan adalah OLS panel data dengan metode *Random Effect* dengan bantuan *software Eviews 7*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Variabel desentralisasi fiskal yang diproksi dengan rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010.

**Kata kunci:** PDRB, Kemiskinan, Tenaga Kerja, Desentralisasi Fiskal

## **A. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang *familier* digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21). Dengan terjadinya Pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya, diantaranya tingkat kemiskinan, tenaga kerja dan Kemandirian Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal, berupa rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berkesinambungan dari suatu kondisi perekonomian menuju keadaan yang lebih baik. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. (Todaro, 2006).

## 2. Kemiskinan

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse, dalam Mudrajat Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

### a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya.

### b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

### c. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk

pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

### 3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang memang sedang bekerja, dan orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak bekerja. Sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. (Dumairy, 1996).

Pada dasarnya pengangguran dapat diartikan sebagai penduduk usia produktif yang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Dari segi produktivitas, penduduk usia kerja yang paling optimal menghasilkan *output* produksi adalah penduduk pada rentang umur 15-64 tahun. (BPS, 2009).

### 4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintah daerah atau lokal dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya sebagai daerah otonom, sehingga otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi (Ulla,2003, Smoke,2001)

Secara umum konsep desentralisasi dibagi menjadi desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Desentralisasi politik merupakan suatu bentuk pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah menyangkut aspek pengambilan keputusan dan berbagai peraturan daerah. (Gozali, 2001). Desentralisasi administratif merupakan pelimpahan kewenangan yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan layanan publik dalam berbagai tingkat pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fiskal adalah

pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sekaligus hak menerima transfer dana atau bantuan pemerintah pusat.

## 5. Hubungan Antar Variabel

### a. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21)

### b. Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh terhadap tenaga kerja terserap, senada dengan hasil temuan Sasana (2009) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja terserap.

### c. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

## 6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Rizal Mubaroq, Sutyastie S. Remi, Bagdja Muljarjadi ( 2013 ) dengan judul “Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia tahun 2007-2010”. Penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten, Investasi Pemerintah, Jumlah Tenaga Kerja, PAD,

PDRB riil per kapita. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Pertama*, Investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja dan desentralisasi fiskal kabupaten di Indonesia pada periode 2007-2010 memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi pada taraf  $\alpha = 1\%$ . *Kedua*, Untuk setiap kenaikan 1% ratio belanja modal terhadap PDRB berlaku akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035%. *Ketiga*, Untuk setiap kenaikan 1000 orang tenaga kerja di kabupaten di Indonesia akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004%. *Keempat*, Desentralisasi fiskal yang diproksi dengan tingkat kemandirian daerah berupa rasio antar Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah juga akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,069% untuk kenaikan setiap 1% tingkat kemandirian daerah.

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **a. Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

##### **b. Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penduduk miskin (PM), tenaga kerja (TK), dan desentralisasi fiskal (DF).

#### **2. Definisi Operasioanal**

##### **a. Desentralisasi Fiskal ( DF )**

Dalam studi ini, desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan persen tahun 2006-2010 di Eks-Karesidenan Surakarta.

##### **b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**



PDRB adalah perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000, yang dinyatakan dalam satuan persen tahun 2006-2010 di Eks-Karesidenan Surakarta.

c. Tenaga Kerja Terserap ( TK )

Tenaga kerja terserap dalam data ini adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, dengan lama bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu yang lalu saat pendataan dilakukan, di masing-masing kabupaten/kota Eks-Karesidenan Surakarta dalam satuan orang tahun 2006-2010.

d. Penduduk Miskin ( PM )

Penduduk miskin dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan kriteria dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin merupakan total penduduk miskin absolut yang berada di setiap kabupaten/kota dalam satuan orang/jiwa tahun 2006-2010 di Eks-Karesidenan Surakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data yang diperlukan adalah:

- a. Data tingkat kemiskinan daerah untuk masing-masing kabupaten/ kota di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006 - 2010.
- b. Data tenaga kerja terserap untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006 - 2010.
- c. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006 - 2010.

- d. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006 - 2010.

#### 4. Sumber Data

- a. Data tingkat kemiskinan daerah untuk masing-masing kabupaten/ kota di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006 - 2010, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah dalam Angka”.
- b. Data tenaga kerja terserap untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006 – 2010, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah dalam Angka”.
- c. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006 – 2010, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah dalam Angka”.
- d. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk masing-masing kabupaten/kota di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006 – 2010, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Jawa Tengah dalam Angka”.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2006 – 2010. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan topik terkait.

#### 6. Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 7. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*).

## 7. Estimasi Model

Model fungsi yang akan digunakan yaitu:

$$PDRB=f(KM, TK, DF)$$

$$PDRB_{it} = \theta_0 + \theta_1 KM_{it} + \theta_2 TK_{it} + \theta_3 DF_{it} + U_{it}$$

dimana:

PDRB=Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun menurut harga konstan tahun 2000.

KM = Total penduduk miskin absolut.

TK = Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melakukan pekerjaan.

DF = Rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan persen.

$i$  = cross section.

$t$  = time series.

$\theta_0$  = konstanta.

$\theta_1, \theta_2, \theta_3$  = koefisien.

$U$  = error.

## D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Estimasi

$$\text{Model Regresi : LNPE} = 12.32650 - 0.420150*(LNPM) + 0.363373 \\ (\text{LN TK}) + 0.015295*(DF) + \mu t$$

$$R^2 = 0,7052$$

$$DW = 1,22773$$

$$F = 24,721$$

\* Signifikan ( ) 0,05

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque Bera. Hasil Uji Jarque-bera pengaruh kemiskinan, tenaga kerja, desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi eks-karesidenan Surakarta tahun 2006-2010. Hasil didalam gambar menunjukkan nilai prob JB sebesar  $0.425359 > 0.05$ , berarti  $H_0$  diterima artinya model diatas terdistribusi normal.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (D-W test) untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara anggota serangkaian observasi runtut waktu atau ruang. Dari hasil estimasi didapat nilai D-W statistik pada LNPE sebesar 1,2273 pada  $N = 35$  dan  $K = 4$  didapat nilai dl sebesar 1,23 dan du sebesar 1,73 dan 4-du sebesar 2,26 dan 4-dl sebesar 2,38 dan DW berada di daerah  $H_0$  di tolak jadi model ada autokorelasi positif.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian untuk mengetahui ada tidaknya *running* views 7.0 adalah sebagai heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji park. Hasil Uji Park dapat dilihat dalam tabel 4.8 *Uji Park*.

Dari tabel menunjukkan bahwa prob masing-masing variabel  $< 0.05$ , sehingga model terdapat heteroskedastisitas. Terjadinya heteroskedastisitas tidak perlu dipermasalahkan, karena menurut Wibisono dalam Ajija,dkk (2011) berdasarkan teori yang dikemukakan Gujarati dan Veerbeck menyebutkan beberapa keunggulan dari data panel salah satunya adalah data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agresi data individu, data panel mampu mengontrol heterogenitas individu sehingga dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang kompleks. Dengan keunggulan tersebut dapat dijadikan dasar bahwa permasalahan heteroskedastisitas yang terjadi dalam data panel sudah dapat teratasi.

### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil estimasi, besarnya  $R^2$  yang diperoleh untuk LNPE adalah sebesar 0.7052. Artinya variabel tingkat LNPE dalam model sebesar 70,52 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam model yaitu LnPM, LnTK dan DF. Sementara 29,48 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.

### 6. Uji Signifikansi Simultan (uji F)

Uji signifikansi parameter atau uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari variabel – variabel independen secara

bersama – sama atau keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Hasil regresi model menunjukkan, signifikansi nilai probabilitas *F-Statistic* dari persamaan 4.7 sebesar 0.0000, lebih kecil dari nilai alpha ( ) 5 persen (0,05) yang berarti dalam model tersebut variabel independennya secara keseluruhan atau serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

#### 7. Uji Signifikansi Individu (uji t)

Uji signifikansi individu bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t- statistik yang lebih kecil dari nilai alpha ( ) 1 persen, 5 persen, atau 10 persen.

Tabel 4.9  
Uji Signifikansi t ( = 0,05) Persamaan PE

Variabel	Prob (t-statistik)	Sig	Kesimpulan
LnPM	0.0000	0.05	Signifikan
LnTK	0.0896	0.05	Tidak Signifikan
DF	0.0301	0.05	Signifikan

Tabel diatas dapat menginterpretasikan bahwa secara individu masing-masing variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen pada level signifikansi 5%, hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai probabilitas t-statistik variabel independen < sig (0.05). Sedangkan satu variabel saja yaitu LnTK tidak signifikan pada level 0.05.

#### 8. Interpretasi dan Pembahasan

##### a. Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi

Variabel kemiskinan menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi eks-karesidenan

Surakarta tahun 2006-2010. Artinya setiap peningkatan PDRB harga konstan sebesar 1 persen dapat menurunkan penduduk miskin sebesar 0,42 persen. Hasil ini sesuai dengan teori Yang mana menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

b. Tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi

Variabel tenaga kerja menunjukkan tanda positif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi eks-karesidenan Surakarta tahun 2006-2010. Artinya temuan ini tidak sesuai dengan landasan teori Horrod-Domar (1946) dalam Subri (2002), bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Senada dengan hasil temuan Sasana (2009) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tenaga kerja terserap.

c. Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi

Variabel desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan persen menunjukkan tanda positif dan berpengaruh secara signifikan. Artinya setiap terjadi pertumbuhan desentralisasi fiskal sebesar 1 persen akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.015 persen. Temuan ini sesuai dengan teorinya Oates (1993) yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) jumlah penduduk miskin, tenaga kerja, desentralisasi fiskal dan dummy terhadap pertumbuhan ekonomi eks-Karesidenan Surakarta menunjukkan bahwa besarnya  $R^2$  cukup tinggi, yaitu 70,52 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yang ada dalam model yaitu LnPM, LnTK dan DF. Sementara 29,48 persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam model ini dan faktor-faktor lainnya.
- b. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010.
- c. Variabel tenaga jumlah kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan setiap pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja terserap di masing-masing kabupaten/kota eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010.
- d. Variabel desentralisasi fiskal yang diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan persen menunjukkan pengaruh positif dan berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diiringi kenaikan desentralisasi fiskal di masing-masing kabupaten/kota eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010.

### 2. Saran

- a. Kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah di masing-masing kabupaten/kota eks-karesidenan Surakarta harus meningkatkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan diseluruh kabupaten/kota di eks-karesidenan

Surakarta, sehingga peningkatan PDRB dapat mempengaruhi kemiskinan secara signifikan.

- b. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah dimasing-masing kabupaten/kota eks-Karesidenan Surakarta harus menggerakkan sektor informal. Sehingga jumlah tenaga kerja dapat terserap tidak hanya di sektor formal semata, tetapi juga dapat terserap di sektor informal.
- c. Desentralisasi fiskal yang diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan persen menunjukkan pengaruh positif dan berpengaruh signifikan. Pemerintah daerah harus terus menggali potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota, dengan penggalan potensi yang dimiliki tersebut akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Gozali, Abbas. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah. Pustaka Lembaga Studi Komunikasi Pembangunan Indonesia (LSKPI)*, Jakarta.
- Oates, W, 1993, *Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal*, XLVI. 237-243.
- Sasana, Hadi. 2009. *Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1, Juni.
- Subri, Mulyadi, 2002, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Rajawali Persada.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom: Pearson Education Limited
- Ulla, M, 2003, *Implikasi Otonomi Daerah terhadap Politik, Hukum dan Ekonomi*, [http://www.otoda.co.id/artikel/implikasi\\_otonom.htm](http://www.otoda.co.id/artikel/implikasi_otonom.htm) (10 Juni 2003).